

## **Performance of the Independent Campus Policy in Certified Internship and Independent Study Programs**

**An Nisaa' Budi Sulistyaningrum<sup>1</sup>, Nurulita Artanti Nirwana<sup>2</sup>, Dhiya Ratri Januar<sup>3</sup>, Nela Najwa Hilalia<sup>4\*</sup>**

Public Administration Study Program , Faculty of Social and Political Sciences,  
Diponegoro University

**ABSTRACT:** Education is a communication process that involves transforming knowledge, values, and skills both inside, and outside the school. Education is one of the compulsory guarantees of education and is provided by the central government to the local government. Ministries of Education, Culture, Research, and Technology established a free learning policy (MBKM), and one of the programs on MSIB policy is a certified internship and independent study (MSIB). This program provides an opportunity for students to have off-campus learning experiences for a semester or two. The study uses qualitative methods, and the data analysis techniques used in the study are the methods for library research. In this case, an alternative policy would be a policy recommendation with an alternative policy recommendation of MSIB programs capable of producing both hard skills and soft skills students acquired from followed activities and implemented programs running optimally.

**Keywords:** public policy analysis, policy recommendations, policy brief, independent college

**Corresponding Author:** [nelanajh@gmail.com](mailto:nelanajh@gmail.com)

## **Performa Kebijakan Kampus Merdeka pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat**

**An Nisaa' Budi Sulistyaningrum<sup>1</sup>, Nurulita Artanti Nirwana<sup>2</sup>, Dhiya Ratri Januar<sup>3</sup>, Nela Najwa Hilalia<sup>4\*</sup>**

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

**ABSTRAK:** Pendidikan merupakan hubungan mengkomunikasikan melibatkan proses perubahan, penilaian, dan terampil dari dalam maupun di luar sekolah. Pendidikan menjadi salah satu urusan yang wajib dijamin dan yang diberikan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kemendikbud-Ristek membuat sebuah Kebijakan Merdeka-Belajar Kampus Merdeka, dan salah satu program yang ada dalam kebijakan MBKM adalah program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Program ini memberikan peluang mahasiswa dengan perolehan apa yang didapatkannya selama satu tahun atau dua semester. Penelitian ini memakai metode kualitatif, dengan teknik analisis yang dipergunakan yaitu metode *library research*. Dalam hal ini, disusunlah alternatif kebijakan berupa rekomendasi alternatif kebijakan. Melalui rekomendasi alternatif kebijakan, program MSIB mampu menghasilkan mahasiswa yang siap dengan *hardskill* maupun *softskill* yang diperoleh dari kegiatan yang diikuti dan program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci:** analisis kebijakan publik, rekomendasi kebijakan, policy brief, kampus merdeka

*Submitted: 5 June; Revised: 15 June; Accepted: 26 June*

**Corresponding Author:** [nelanajh@gmail.com](mailto:nelanajh@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sistem komunikasi yang melibatkan nilai dan keterampilan, transformasi pengetahuan, dalam ataupun luar sekolah, di masyarakat, di lingkungan keluarga, dan belajar sepanjang hayat (*longlife learner*) dari generasi ke generasi. Pendidikan sebagai wujud kesadaran kemanusiaan tidak lepas dari keterbatasan, baik yang melekat pada diri peserta didik, pendidik, interaksi pendidik, lingkungan, maupun dalam sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu urusan yang wajib dijamin karena merupakan wujud pelayanan publik dari regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan ini harus dipatuhi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai prinsip dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang mensyaratkan agar dapat pelaksanaan yang semestinya yang adil dengan junjungan HAM serta mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan begitu, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi kesatuan sistematis serta multimakna.

Dalam hal ini, Kemendikbud-Ristek membuat sebuah kebijakan berupa Kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut dibentuk sebagai tahapan untuk mentransformasi pendidikan guna dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang mempunyai profil Pancasila. Program Merdeka Belajar adalah adanya kebijakan Kampus Merdeka atau MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) bagi perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kemendikbud-Ristek. Kampus Merdeka adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan pemberian tujuan untuk mewujudkan dinamika pembelajaran yang mandiri dan luwes dalam perguruan tinggi dengan harapan menciptakan budaya belajar yang kreatif dan inovatif yang menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan dari mahasiswa.

MBKM sendiri mempunyai regulasi yang menjadi landasan hukum untuk mengatur pelaksanaan MBKM supaya pelaksanaan dari MBKM dapat berjalan sesuai dengan rancangan Kemendikbud-Ristek selaku pembuat kebijakan ini. Regulasi tersebut terdiri dari, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri), dan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai buku panduan dalam penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Dalam program MBKM ini sendiri memiliki 8 kegiatan dari program MBKM di antaranya; (1) pertukaran pelajar, (2) magang/praktik kerja, (3) studi independen, (4) mengajar di sekolah, (5) penelitian atau riset, (6) membangun Desa atau KKN Tematik (KKNT), (7) wirausaha, serta (8) proyek kemanusiaan. Berbagai kegiatan program MBKM tersebut memiliki program yang banyak peminatnya yakni salah satunya Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka (MSIB). Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MSIB) merupakan salah satu program milik Kemendikbud-Ristek dengan

tujuan memberikan kesempatan magang, kesamaan. Lalu, dengan apa yang dialami saat pembelajaran dengan sebenarnya dan (MOOC), serta lainnya.

Berdasar pada yang telah dipaparkan, ialah perumusan permasalahan Mengapa pelaksanaan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) kurang maksimal. Pembahasan dalam penulisan ini bertujuan untuk memaksimalkan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang pada implementasinya saat ini masih kurang optimal.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Kebijakan Publik*

Kebijakan publik dimaknai sebagai gagasan dasar dari rencana pemerintah ataupun suatu organisasi publik dalam mengatur kepentingan masyarakat atau hal umum. Selain itu, kebijakan publik juga dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang multidisipliner karena turut melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, ekonomi, social, hingga psikologi. Menurut Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwtri (2008:10) juga turut memaparkan mengenai definisi kebijakan publik yang dipahami sebagai berbagai program yang dibuat pemerintahan agar dapat mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, kebijakan publik sebagai suatu rangkaian keputusan disusun seorang actor kebijakan maupun sekelompok aktor politik dengan dilakukannya suatu pemilihan berbagai tujuan serta cara agar tujuan atau sasaran dapat digapai secara optimal dalam situasi tertentu, keputusan tersebut secara prinsip seyogyanya masih berada dalam kekuasaan para aktor tersebut agar dapat mencapainya (William J., 1978). Para tokoh lain juga turut mengemukakan *statement* mengenai defisini kebijakan publik. Menurut Shafritz dan Rusell, *public policy is whatever government decides to do or not to do*, dapat diartikan bahwasannya kebijakan publik yaitu pemilihan melaksanakan bukan hanya oleh pemerintah. Pemerintah sudah sepantasnya memiliki tujuan serta bersikap objektif dan tentu saja meliputi segala tindak pemerintah apabila pilihannya jatuh pada melakukan sesuatu.

### *Analisis Kebijakan Publik*

Analisis kebijakan merupakan aktivitas atau kegiatan dalam memformulasikan pengetahuan mengenai tahapan pembuatan suatu kebijakan yang memiliki hubungan dengan sebab, akibat, serta kinerja kebijakan. William Dunn mengemukakan bahwasannya analisis kebijakan publik digunakan untuk melihat substansi dari kebijakan yang meliputi informasi yang berkenaan dengan permasalahan publik yang akan diselesaikan serta dampak yang ditimbulkan atas akibat dari suatu kebijakan yang diimplementasikan. Analisis kebijakan publik digunakan untuk menyediakan metodologi yang sistematis sebagai jalan untuk memecahkan permasalahan yang rumit. Proses analisis kebijakan ini melalui serangkaian tahapan yang saling bergantung satu sama lain, tahapan bermula dari merumuskan masalah, membuat suatu proyeksi kebijakan atau peralaman kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan pemantauan atau *monitoring* kebijakan, hingga pada tahapan evaluasi kebijakan. Hasil dari analisis kebijakan mampu menyajikan informasi

yang relevan, selaras dengan kebijakan yang ada, serta tergantung pada tipe masalah yang dihadapi.

Analisis kebijakan publik memiliki tujuh langkah, di antaranya sebagai berikut, (1) Formulasi Masalah Kebijakan, dalam menyelesaikan permasalahan publik dengan hubungan yang berhadapan; (2) Formulasi Tujuan, kebijakan yang direncanakan nantinya bertujuan untuk memecahkan masalah publik yang ada. Analisis kebijakan ini sendiri harus dapat merumuskan tujuan secara jelas, realistis, dan terukur; (3) Penentuan Kriteria, analisis kebijakan yang dibutuhkan dengan penilaian yang ada; (4) Penyusunan Model, model dalam hal ini bermanfaat untuk mempermudah deskripsi persoalan secara struktural dengan membantu melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul; (5) Pengembangan Alternatif, dari alat ataupun cara yang dipakai dengan tujuan baik; (6) Penilaian Alternatif, alternatif yang ada nantinya akan dinilai berdasarkan gambaran tingkat efektivitas dan fisibilitas dari setiap alternatif yang diperoleh, alternatif yang telah dikumpulkan tersebut akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian akan diperoleh alternatif terbaik; dan (7) Rekomendasi Kebijakan, proses mengevaluasi atau menilai beberapa alternatif kebijakan untuk menentukan tindakan kebijakan terbaik yang digunakan untuk mengatasi gejala sosial yang ada.

#### *Kampus Merdeka: Program Magang dan Studi Bersertifikat*

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan salah satu metode pembelajaran, dari kedelapan metode studi yang diselenggarakan dalam program Kampus Merdeka. Program MSIB menjadi wadah untuk memahami kelas, rancangan berdasar kepada kenyataan perusahaan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program ini yaitu dapat berupa kursus singkat, *bootcamp*, kursus daring terbuka secara besar-besaran (MOOC) serta lainnya. Selain itu, program MSIB ini diselenggarakan oleh pemerintah untuk dapat pemberian hubungan negara sebagai upaya dan penghubung karena seperti yang diketahui saat ini negara kita masih perlu meningkatkan kemampuan SDM yang selaras dengan budaya organisasi.

Terdapat tiga regulasi yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan MBKM khususnya dalam program MSIB, antara lain:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berisi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), ada delapan kegiatan kampus dengan kategorinya *Microcredential*.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri). Berisi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Perguruan tinggi dituntut praktik hubungan 8 hal utamanya.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Buku Panduan yaitu panduan fleksibel dengan pembaharuan yang ada.

#### **METODOLOGI**

Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data untuk menginterpretasikan kejadian yang terjadi pada suatu latar alamiah. Menurut Bagdan dan Taylor (Moleong, 2018), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mewujudkan data deskripsi berupa kalimat tertulis maupun lisan dari individu yang berkaitan dengan fenomena yang diamati. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (1994), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai metode yang ada menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang ada, dipakai dengan pendekatan kualitatif. Penulis dalam hal ini berpangkal pada pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan secara objektif partisipasi terhadap suatu gejala atau fenomena sosial, baik keadaan di masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Gejala sosial yang terjadi berkaitan dengan objek-objek ekonomi, hukum, budaya, ilmu sosial, sejarah, serta ilmu sosial lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*. Metode *library research* atau metode kepustakaan merupakan penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku, artikel, dokumen, maupun literatur *online* sebagai sumber datanya. Data dari berbagai literatur tersebut nantinya akan dianalisis atau diuraikan sesuai dengan topik yang dibahas. Metode ini tidak menuntut peneliti untuk melihat fakta yang ada sampai terjun langsung ke lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kebijakan program “Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)” yang menjadi acuan. Sedangkan, sumber sekunder penelitian ini didapat observasi tidak langsung serta artikel jurnal lainnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Data dan Indikasi MSIB*

Jumlah kuota MSIB pada tahun 2021 atau tepatnya pada *batch* 1 terdapat kuota sejumlah 20.000 mahasiswa. Selanjutnya pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Januari–Juni terdapat 25.000 kuota bagi mahasiswa yang akan mengikuti MSIB, lalu pada bulan Juli – Desember 2022 nantinya akan ada kuota sebanyak 25.000 mahasiswa juga untuk mahasiswa yang mengikuti MSIB. Jumlah kuota MSIB ini mengalami kenaikan karena mempunyai korelasi dengan Surat Edaran Nomor 13678/E1/DI.00.01/2021 yang dikeluarkan oleh Dikti bahwasannya menurut mayoritas mahasiswa MSIB *batch* 1, program MSIB patut direkomendasikan ke mahasiswa lain. Jumlah peserta MSIB pada *batch* 1 sebanyak 13.272 mahasiswa, sedangkan jumlah mahasiswa yang mengikuti MSIB *batch* 2 hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti, karena pihak Kemendikbud-Ristek selaku penyelenggara program juga belum mempublikasikan data terbaru ini.

Berdasarkan beberapa temuan melalui sosial media serta kuesioner yang penulis buat. Kemunculan petisi yang dibuat oleh mahasiswa yang mengikuti MSIB angkatan pertama, petisi ini dikelola oleh aliansi mahasiswa MSIB angkatan pertama dan hingga saat ini petisi telah ditandatangani oleh 11.021 mahasiswa yang menuntut untuk merealisasikan uang saku yang telah dijanjikan sebelumnya. Indikasi selanjutnya, ramainya utas yang berkaitan dengan kendala MSIB pada angkatan pertama. Berdasarkan utas tersebut

terdapat empat tuntutan di antaranya (1) Cairkan hak uang saku mahasiswa MSIB *batch* 1 bulan Oktober dan November yang sampai saat ini masih belum cair (2) Cairkan hak uang saku bulan Desember bagi semua mahasiswa MSIB *batch* 1 (3) Cairkan uang ganti rugi bagi mahasiswa yang WFO (*Work From Office*) ke luar kota (4) Cairkan honor mentor (mitra) setiap bulannya. Data Indikasi ketiga yang ditemui dalam kuesioner yang penulis buat, pertanyaan berkaitan "Kendala apa yang Anda hadapi saat mengikuti program MBKM, khususnya MSIB?". Berdasarkan kuesioner tersebut, kendala yang dihadapi yaitu pencairan uang saku dan konversi, jaringan yang kurang stabil, kurangnya pemahaman secara intens, lamanya pencairan uang saku, serta merasa bingung dengan sistem konversi SKS mata kuliah.

#### *Identifikasi Masalah*

1. Lamanya pencairan uang saku.
2. Sulitnya konversi mata kuliah, karena banyak yang tidak sesuai dengan kegiatan magang.
3. Jam waktu kerja yang kurang sesuai dengan perjanjian dan *job description* yang tidak sesuai dengan web MBKM.
4. Kurangnya sebuah informasi mengenai kebijakan konversi SKS di kampus. Selain itu tidak semua dosen memahami sistem konversi SKS dalam MBKM.
5. Jumlah uang saku MSIB *batch* 2 mengalami penurunan dan masih mengalami keterlambatan.

Program Kampus Merdeka masih belum matang dalam persiapannya terlebih apabila nantinya menteri yang menjabat akan berganti, sudah menjadi rahasia umum apabila program di dunia pendidikan selalu berubah-ubah bergantung pada menteri yang sedang menduduki kursi jabatan. Munculnya kekhawatiran program yang sudah dilaksanakan ini akan berganti lagi. Selain itu, pendidikan serta pengajaran program Kampus Merdeka juga belum tersusun dengan baik. Prosedur pelaksanaan dari pendidikan serta pengajaran belum mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Sumber daya manusia pun masih kurang terstruktur, karena kurang matangnya persiapan menimbulkan kualitas SDM pelaksana yang kurang memenuhi harapan. Bahkan kenyataannya tidak semua dosen memahami apa itu Kampus Merdeka, proses konversi SKS, hingga program-program yang ada di dalam program tersebut.

Dalam perjalanannya, program yang masih berumur kurang satu tahun ini berjalan dengan baik pada awalnya. Namun, di tengah perjalanan muncul berbagai hambatan. Salah satu program yang sedang ramai diperbincangkan adalah terlambatnya pemberian uang saku pada mahasiswa yang mengikuti program MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat). Program yang secara nasional ini di mulai pada 23 Agustus 2021 mendapatkan kritikan dari mahasiswa terkait uang saku pada bulan kedua dan ketiga mengalami keterlambatan, bahkan masih terdapat ribuan mahasiswa yang belum menerima uang saku bulan pertama. Pada 29 Oktober 2021 Kemendikbud-Ristek merilis

siaran pers terkait keterlambatan uang saku tersebut juga masih kurang menjawab keresahan mahasiswa yang mengikuti MSIB. Apabila menengok kembali postingan akun resmi Instagram dari Kampus Merdeka, pemberian uang saku menjadi salah satu *branding* dari magang merdeka agar banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Implementasi MBKM perlu adanya dukungan pula dari pihak universitas, fakultas atau prodi, serta dosen. Pentingnya sosialisasi program MBKM bagi semua pihak akan dapat lebih memudahkan implementasi MBKM terutama MSIB. Sebab, pada kenyataannya tidak semua dosen atau bahkan fakultas atau prodi memahami bagaimana prosedur konversi SKS dalam MBKM. Tantangan yang dihadapi dalam MBKM memang tidak mudah karena konversi SKS dengan mata kuliah yang selaras dengan program studi, permasalahan *core competency*, serta dibutuhkan adanya kesesuaian untuk mendukung teknologi pembelajaran sama di antara kedua kampus yang terlibat atau kampus dengan perusahaan misalnya. Penyelarasan kurikulum juga menjadi hal yang tidak terhindarkan karena kampus merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan konversi SKS sebesar 20 SKS pada program studi dalam satu semesternya. Perumusan kurikulum dalam menentukan CPL harus didesain dengan hati-hati, desain inilah yang dapat meningkatkan profesionalitas *civitas* akademika. Permasalahan konversi SKS dari hasil MSIB juga memiliki pertimbangan sendiri, apakah kegiatan MSIB yang telah diikuti mahasiswa mampu menggantikan aspek teoritis dalam *core competency* program studi. Mahasiswa juga perlu cerdas dalam memilih program MSIB yang akan diikuti, apakah rancangan kegiatan pada mitra selinear dengan program studi mahasiswa. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan, utamanya bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan konversi SKS. Diperlukan adanya sinergitas dalam menghadapi tantangan serta permasalahan dalam implementasi MBKM antarpihak yang bekerja sama. Selain itu, dalam implementasi sendiri penyelarasan berbagai kebijakan, aturan, ataupun percepatan dukungan sistem dan pangkalan juga perlu diperhatikan.

#### *Alternatif Kebijakan*

Alternatif kebijakan merupakan berbagai cara atau berbagai pilihan yang tersedia untuk pembuat kebijakan agar tujuan dari kebijakan publik dapat dicapai. Alternatif kebijakan publik dapat berwujud kebijakan, tindakan, hingga strategi. Alternatif kebijakan adalah arah tindakan publik yang masih potensial atau belum dilaksanakan, yang nantinya dapat memuaskan nilai atau kepuasan suatu kebutuhan publik, dengan kata lain alternatif kebijakan adalah suatu tindakan yang dapat dipilih untuk mengatasi suatu masalah. Oleh karena itu, informasi tentang pilihan kebijakan merupakan salah satu komponen terpenting dari analisis kebijakan publik. Dengan demikian, kelengkapan suatu informasi akan sangat memengaruhi pada suatu permasalahan kebijakan yang nantinya dapat dipecahkan atau tidak. Selain itu, informasi mengenai persoalan kebijakan dapat dipindahkan ke dalam alternatif kebijakan melalui penggunaan

prosedur peramalan (*forecasting*), dan alternatif kebijakan akan tergantung pada *problem* kebijakan yang dibuat.

Berikut alternatif kebijakan yang penulis buat dalam permasalahan program MSIB:

1. Membuat sebuah pedoman dan kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, lembaga lain, perusahaan, serta industri.
2. Sosialisasi program MSIB serta alur konversi SKS sesuai dengan prosedur program studi.
3. Fakultas memberikan fasilitas pada mahasiswa untuk mendapatkan informasi terkait program MSIB.
4. Merencanakan secara bersama dengan Dosen Wali mengenai sebuah program mata kuliah yang akan diambil di luar program studi maupun di luar universitas.
5. Bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa (Hima) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat fakultas secara sinergis, mulai dari sosialisasi hingga proses konversi SKS selesai.

#### *Kriteria Penilaian Alternatif Kebijakan*

Menurut U. Bardach terdapat beberapa parameter atau kriteria kebijakan, di antaranya sebagai berikut:

1. Kelayakan Teknis atau *technical feasibility* merupakan salah satu kriteria menurut Bardach yang dimanfaatkan sebagai pengukur apakah suatu kebijakan ataupun program dapat efektif dalam mencapai tujuan. Kelayakan teknis memiliki titik fokus perhatian pada suatu kebijakan yang nantinya diimplementasikan layak secara teknis.
2. Kelayakan ekonomi dan finansial atau *economic and financial possibility* menjadi salah satu kriteria yang turut dimanfaatkan sebagai pengukur seberapa besar biaya yang perlu dikeluarkan guna pelaksanaan sebuah kebijakan serta seberapa besar keuntungan yang nantinya akan dihasilkan.
3. Kelangsungan politik atau *political viability* adalah kriteria penilaian alternatif kebijakan yang berguna sebagai alat pengukur keberhasilan dari suatu kebijakan, karena adanya beberapa faktor yang turut memengaruhi dari berbagai kelompok kekuasaan di antaranya yaitu administrator, organisasi sosial, pembuat keputusan legislatif, perkumpulan dan aliansi politik, serta organisasi kemasyarakatan.
4. Kelayakan operasionalitas administrasi atau *administrative operability* juga menjadi salah satu unsur dalam penilaian alternatif kebijakan yang dimanfaatkan dalam pengukuran bagaimanakah pelbagai kemungkinan dalam melaksanakan kebijakan yang telah direkomendasikan dalam konteks administrasi.

Tabel 1. Pembobotan Alternatif:

No	KRITERIA	SUB KRITERIA	BOBOT	SKOR
1	Kelayakan Teknis	Regulasi	10%	1 = Tidak layak 2 = Kurang layak 3 = Cukup layak 4 = Layak 5 = Sangat layak
		Kemampuan/keahlian SDM (Dosen)	5%	
2	Kelayakan Ekonomi	Pemanfaatan Hardskill bagi mahasiswa	10%	
		Pemanfaatan Softskill bagi mahasiswa	10%	
3	Kelayakan Politik	Partisipasi Perguruan Tinggi	10%	
		Partisipasi Mahasiswa	10%	
4	Kelayakan Administrasi	Informasi Website Program MBKM	10%	
		Informasi Pihak Instansi (Prodi)	5%	
5	Kelayakan Lingkungan	Kolaborasi dengan Organisasi lain	15%	
		Dukungan Instansi (Prodi)	15%	

Tabel 2. Skoring Alternatif:

No	Kriteria/ Sub Kriteria	Skor Alternatif				
		1	2	3	4	5
1.	Kelayakan Teknis					
	Regulasi	3	4	4	3	3
	Kemampuan/keahlian SDM	3	3	4	3	5
2.	Kelayakan EKonomi					
	Pemanfaatan Hardskill bagi mahasiswa	3	4	4	4	4
	Pemanfaatan Softskill bagi mahasiswa	3	4	4	4	5
3.	Kelayakan Politik					
	Partisipasi Perguruan Tinggi	2	4	3	3	4
	Partisipasi Mahasiswa	2	3	4	3	4
4	Kelayakan Administrasi					
	Informasi Website Program MBKM	3	3	4	3	4
	Informasi Pihak Instansi (Prodi)	3	4	4	4	3
5.	Kelayakan Lingkungan					
	Kolaborasi dengan Organisasi Lain	3	5	4	5	4
	Dukungan Instansi (prodi)	3	4	3	4	4

Tabel 3. Skor X Bobot (Ranking Penilaian)

No	Kriteria/Sub Kriteria	BOBOT	Skor Alternatif				
			1	2	3	4	5
1	Kelayakan Teknis						
	Regulasi	10%	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
	Kemampuan/keahlian SDM	5%	0,15	0,15	0,2	0,15	0,25
2	Kelayakan EKonomi						
	Pemanfaatan Hardskill bagi mahasiswa	10%	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
	Pemanfaatan Softskill bagi mahasiswa	10%	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5
3	Kelayakan Politik						
	Partisipasi Perguruan Tinggi	10%	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4
	Partisipasi Mahasiswa	10%	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4
4	Kelayakan Administrasi						
	Informasi Website Program MBKM	10%	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
	Informasi Pihak Instansi (Prodi)	5%	0,15	0,2	0,2	0,2	0,15
5	Kelayakan Lingkungan						
	Kolaborasi dengan Organisasi Lain	15%	0,45	0,75	0,6	0,75	0,6
	Dukungan Instansi (prodi)	15%	0,45	0,6	0,45	0,6	0,6
	TOTAL	100%	2,8	3,9	3,75	3,7	4,00
	RANKING		V	II	III	IV	I

1. **Pada Ranking I** ini dengan nilai sebesar 4,00 yang mana alternatifnya sebagai berikut “Bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa (Hima) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat fakultas secara sinergis, mulai dari sosialisasi hingga proses konversi SKS selesai”.
2. **Pada Ranking II** ini dengan nilai sebesar 3,9 yang mana alternatifnya sebagai berikut “Sosialisasi program MSIB serta alur konversi SKS sesuai dengan prosedur program studi”.
3. **Pada Ranking III** ini dengan nilai 3,75 yang mana alternatifnya ini sebagai berikut “Fakultas memberikan fasilitas pada mahasiswa untuk mendapatkan informasi terkait program MSIB”.
4. **Pada Ranking IV** ini dengan nilai sebesar 3,7 yang mana alternatifnya ini sebagai berikut “Merencanakan secara bersama dengan Dosen Wali mengenai program mata kuliah yang akan diambil di luar program studi maupun di luar universitas”.
5. **Pada Ranking V** ini dengan nilai sebesar 2,8 yang mana alternatifnya sebagai berikut “Membuat sebuah acuan dengan apa yang disepakati.

#### Rekomendasi

Rekomendasi merupakan sebuah sarannya, memeriksa berdasar hasil penunjukan pada orang ataupun badan kebijakan yang dibuat. Sehingga dalam hal ini terdapat tiga rekomendasi program dari kebijakan MSIB berdasarkan jangka waktunya, yaitu sebagai berikut:

### 1. Jangka Pendek

No	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KERJA JANGKA PENDEK			
		Tujuan	Waktu	Pelaksana	Unsur
1	Koordinasi secara matang antara Kemendikbud-Ristek dengan perusahaan mitra	Menyelaraskan gagasan antara Kemendikbud dengan perusahaan mitra	6 Bulan	Kemendikbud-Ristek	Perusahaan Mitra
2	Memberikan seminar untuk dosen terutama untuk kepala prodi atau jurusan	Memahami program MSIB terutama dalam konversi SKS	2 Minggu	Kemendikbud-Ristek	Dosen atau kepala prodi
3	Kemendikbud-Ristek memberikan webinar kepada mahasiswa	Memberikan sebuah informasi pada mahasiswa terkait pelaksanaan MSIB	1 Minggu	Kemendikbud-Ristek	Mahasiswa
4	Program Studi memberikan sosialisasi kepada mahasiswa	Agar mahasiswa mampu memahami prosedur konversi SKS dalam MSIB	1 Minggu	Program Studi	Mahasiswa

### 2. Jangka Menengah

No	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH			
		Tujuan	Waktu	Pelaksana	Unsur
1	Pengembangan kurikulum merdeka belajar berorientasi program MSIB	Mempersiapkan pengembangan softskill dan hardskill mahasiswa	5 Tahun	Kemendikbud-Ristek dan fakultas	Fakultas dan prodi
2	Program bimbingan teknis MSIB secara berkala	Mengetahui perkembangan setiap batch atau tahunnya, agar nantinya ketika dievaluasi tidak salah bidik	5 Tahun	Kemendikbud-Ristek	Dosen

### 3. Jangka Panjang

No	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KERJA JANGKA PANJANG			
		Tujuan	Waktu	Pelaksana	Unsur
1	Program kerjasama universitas dengan Kemendikbud-Ristek dan Perusahaan Mitra	Memberikan jaminan perlindungan hak bagi mahasiswa MSIB	15 Tahun	Kemendikbud-Ristek dan perusahaan mitra	Fakultas dan Prodi
2	Program monitoring MSIB secara berkala oleh Kemendikbud-Ristek dan universitas	Memberikan sebuah arahan dalam program MSIB di universitas dan perusahaan mitra	10 Tahun	Kemendikbud-Ristek dan perusahaan mitra	Fakultas dan Prodi

Pada umumnya rekomendasi merupakan sebuah informasi tentang serangkaian tindakan kebijakan yang dapat memberikan sebuah hasil-hasil yang bernilai bagi sekelompok orang tertentu atau pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam rekomendasi kebijakan ini juga terdapat tiga jenis rekomendasi menurut jangka waktu hal ini digunakan sebagai sebuah penentu rekomendasi yang baik berdasarkan jangka waktu yang disediakan, dan pada ketiga jenis jangka waktu tersebut antara lain yakni; **(1) Rekomendasi Jangka**

**Pendek**, pada rekomendasi jangka pendek ini merupakan sebuah rencana kerja dan program kegiatan yang memiliki sebuah tujuan dari program kegiatan yang ada dengan penentu waktu yang singkat. Dalam rekomendasi jangka pendek ini biasanya untuk waktunya hanya sekitar dua minggu dan paling lama sekitar enam bulan, dengan begitu disebut dengan rekomendasi jangka pendek ini karena memiliki rencana kerja dengan waktu yang singkat. Dalam kebijakan program MSIB ini rekomendasi jangka pendeknya ini memiliki empat program kegiatan yakni program kegiatan yang **Pertama**, adalah Koordinasi secara matang antara Kemendikbud-Ristek dengan perusahaan mitra, yang mana program kegiatan ini Kemendikbud melakukan sebuah diskusi dan koordinasi kepada perusahaan mitra untuk bisa melaksanakan sebuah kerjasama di dalam program MSIB Kampus Merdeka. Dalam program kegiatan pertama ini mempunyai jangka waktu enam bulan saja dengan tujuan yang dimiliki yakni untuk menyelaraskan gagasan antara Kemendikbud dengan perusahaan mitra yang bersedia untuk melakukan kerjasama ini. **Kedua**, memberikan seminar untuk dosen terutama untuk kepala prodi atau jurusan dengan memberikan sebuah seminar ini bertujuan agar para dosen dan kepala prodi ini dapat memahami program MSIB terutama dalam sebuah konversi SKS. Rencana kerja jangka pendek dalam program kegiatan kedua ini memiliki waktu singkat yang hanya dilakukan pada dua minggu saja, dan pelaksana yang dilakukan adalah dari Kemendikbud-Ristek. **Ketiga**, program kegiatan yang ketiga ini adalah Kemendikbud-Ristek memberikan webinar kepada mahasiswa dalam kegiatan ketiga ini bertujuan untuk memberikan sebuah informasi pada mahasiswa terkait pelaksanaan MSIB dan juga mahasiswa mempunyai sebuah gambaran dengan melalui sebuah webinar. Rencana kerja jangka pendek pada program kegiatan ketiga ini mempunyai waktu yang singkat yaitu hanya satu minggu, dan pelaksana yang dilakukan ini oleh Kemendikbud-Ristek dengan unsur mahasiswa. Terakhir **Keempat**, pada program kegiatan keempat ini adalah program studi memberikan sebuah sosialisasi kepada mahasiswa, dengan rencana kerja jangka pendek yang bertujuan dari program keempat ini agar mahasiswa mampu memahami prosedur konversi SKS dalam MSIB, dan dengan waktu hanya satu minggu dengan pelaksana yang dilakukan adalah program studi dengan unsur mahasiswa.

Kemudian **(2) Rekomendasi Jangka Menengah**, pada rekomendasi jangka menengah ini merupakan sebuah rencana kerja dan program kegiatan yang memiliki sebuah tujuan dari program kegiatan yang ada dengan penentu waktu yang cukup lama yakni biasanya pada jangka menengah ini mempunyai waktu lima tahun. Dalam rekomendasi jangka menengah ini juga memiliki dua program kegiatan yang mana dilengkapi dengan rencana kerjanya berupa tujuan, waktu, pelaksana, serta unsur. Pada program **Pertama** ini program kegiatannya berupa sebuah pengembangan kurikulum merdeka belajar berorientasi program MSIB, yang mana dari program pertama ini mempunyai tujuan dari rencana kerja pada program kegiatan pertama ini yaitu mempersiapkan sebuah pengembangan *softskill* dan *hardskill* mahasiswa dengan pelaksana yang dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek dan fakultas dengan unsur fakultas dan prodi. **Kedua**, pada program kegiatan kedua ini berupa program

bimbingan teknis MSIB secara berkala, dari program kedua ini mempunyai tujuan dari rencana kerja pada program kegiatan kedua ini yaitu untuk mengetahui sebuah perkembangan setiap *batch* atau tahunnya, agar nantinya ketika dievaluasi tidak salah bidik. Dengan pelaksana yang dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek dengan unsur tenaga pendidik. Dalam kedua program kegiatan di dalam rekomendasi jangka menengah ini sama-sama mempunyai waktu yang cukup lama yakni kedua program tersebut dilakukan pada lima tahun.

Kemudian pada rekomendasi terakhir ini adalah **(3) Rekomendasi Jangka Panjang**, pada rekomendasi jangka panjang ini merupakan sebuah rencana kerja dan program kegiatan yang memiliki sebuah tujuan dari program kegiatan yang ada dengan penentu waktu yang lama yakni biasanya pada jangka panjang ini mempunyai waktu 10–20 tahun lamanya. Dalam rekomendasi jangka panjang ini juga memiliki dua program kegiatan yang mana dilengkapi dengan rencana kerjanya berupa tujuan, waktu, pelaksana, serta unsur. Pada program kegiatan **Pertama**, ini adalah program kerja sama universitas dengan Kemendikbud-Ristek dan perusahaan mitra. yang mana pada program kegiatan pertama ini memiliki sebuah tujuan berdasarkan rencana kerja jangka panjang, yaitu memberikan sebuah jaminan perlindungan hak bagi mahasiswa MSIB berupa sebuah saling menghormati dengan para mahasiswa magang di perusahaan mitra yang terkait dengan kerja sama Kemendikbud-Ristek. Pada waktu program kegiatan pertama ini 15 tahun dengan pelaksana yang dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek dan perusahaan mitra dan dengan sebuah unsur fakultas dan prodi. **Kedua**, pada program kegiatan kedua ini adalah Program *monitoring* MSIB secara berkala oleh Kemendikbud-Ristek dan universitas, dalam program kedua ini juga bertujuan untuk memberikan sebuah arahan dalam program MSIB di universitas dan perusahaan mitra, dengan jangka waktu 10 tahun pada program kedua ini. Kemudian pelaksana yang dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek dan perusahaan mitra dengan unsur fakultas dan prodi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-Ristek yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dinilai perlu mengadakan pembenahan. Hal ini karena kebijakan yang telah diimplementasikan tidak berjalan seperti yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, dengan dibuatnya alternatif kebijakan dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah sebagai bentuk upaya pembenahan yang dapat diimplementasikan pada gelombang selanjutnya.

Artikel ini mempunyai tiga bentuk rekomendasi yaitu di antaranya alternatif jangka pendek, alternatif jangka menengah, dan jangka panjang yang mana dari ketiga alternatif tersebut bergantung pada kebutuhan dari pelaksanaan program. Pada alternatif kebijakan jangka pendek menekankan pada koordinasi dengan berbagai mitra yang bekerja sama lebih giat untuk dilakukan demi menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Lalu, pada alternatif kebijakan jangka menengah lebih difokuskan pada perkembangan setiap gelombang program dengan meninjau hasil dari

pelaksanaan program MSIB agar kesalahan yang terjadi dijadikan bahan evaluasi dan perubahan untuk program selanjutnya. Alternatif kebijakan yang terakhir yaitu alternatif jangka panjang mengedepankan peran Kemendikbud-Ristek yang konsisten terhadap mitra dalam menjalin kerja sama dengan senantiasa memberikan fasilitas jaminan dan arahan pasti di setiap gelombang program yang dilaksanakan. Sehingga, melalui alternatif kebijakan tersebut program MSIB mampu menghasilkan mahasiswa yang siap dengan *hardskill* maupun *softskill* yang diperoleh dari kegiatan yang diikuti.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan. Hal ini karena membutuhkan kajian lebih lanjut terkait kebijakan yang diimplementasikan terhadap program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-Ristek. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidak berhasilnya kebijakan yang ada pada program MSIB. Oleh sebab itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji unsur-unsur lain dalam penyelenggaraan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang dapat menghadirkan pengalaman yang mampu dijadikan pembelajaran maupun acuan agar dapat tercapai kualitas program yang dibuat oleh Kemendikbud-Ristek.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan dan kebahagiaan yang telah penulis terima. Jurnal ini didedikasikan sebagai salah satu bentuk kontribusi kepada mahasiswa khususnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan laporan jurnal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andari, S., Windasari, W., Chandra Setiawan, A., & Rifqi, A. (2021). Student Exchange Program of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) in Covid-19 Pandemic. *JPP (Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 28(1), 30–37. <https://doi.org/10.17977/um047v28i12021p030>
- Anggito, A. & J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); 1st ed.). Sukabumi: CV Jejak.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin (ed.); 2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fatah, A. (2021). Eksplorasi Dukungan Industri Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Seminar Nasional*

- Teknologi Pembelajaran*, 283–290.  
<https://snastep.com/proceeding/index.php/snastep/article/view/62>
- Fuadi, T. M., & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), 603–614. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); 1st ed.). Medan: Wal ashri Publishing.
- Kamalia, P. U., & Andriansyah, E. H. (2021). Independent Learning-Independent Campus (MBKM) in Students' Perception. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(4), 857. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i4.4031>
- Meilani, Y. F., & dkk. (2022). PERSPEKTIF INTEGRATIF FAKTOR FAKTOR PENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BAGI MAHASISWA DI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munadi, H. M. (2020). Merdeka Belajar, Kampus Merdeka: Bagaimana Desain Ulang Kurikulum Kita. *Journal of Quality in Higher Education*. <https://iain-surakarta.ac.id/merdeka-belajar-kampus-merdeka-bagaimana-desain-ulang-kurikulum-kita/>
- Purwanto, E. A., & dkk. (2015). *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA FISIP UPN VETERAN JAWA TIMUR. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2).
- Supatmi, S., Herdiana, B., Utama, J., Pohan, M. A. R., & Rahajoeningroem, T. (2021). Analisis Hasil Survei SPADA Dikti 2021 dan Dampaknya Terhadap Rekomendasi Kebijakan Implementasi Kampus Merdeka. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 732–746. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1894>
- Tim Microcredential. (2021). *Magang dan studi independen bersertifikat*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.